

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 menyatakan, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.546,66 triliun atau hampir 86 persen dari total penerimaan negara, namun target tersebut belum tentu tercapai karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada periode 2012-2015 target penerimaan pajak Indonesia tidak mencapai target yang direncanakan karena disebabkan beberapa faktor yaitu lesunya perekonomian global yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Lesunya ekonomi Indonesia akan memengaruhi pendapatan perusahaan-perusahaan yang menjadi objek pajak. Pendapatan perusahaan yang menurun akan menyebabkan perusahaan untuk menekan serendah-rendahnya biaya-biaya yang timbul termasuk biaya pajak. (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, hukum, dan perilaku wajib pajak. Perilaku wajib pajak contohnya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak (Rahayu, 2010:146). Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Putra dan Merkusiwati, 2016)

Terkait dengan penghindaran pajak ini diIndonesia pada tahun 2010-2014 terdapat fenomena perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, diantaranya:

UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.1
Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan

Nama Perusahaan	Rentan waktu	Jenis Tax Avoidance
PT. RNI	2010-2014	Penyalagunaan tarif pengenaan pajak UMKM. Memasukkan modal sebagai hutang
PT. Toyota Motor Manufakturing Indonesia (TMMIN)	2010-2013	Pembelian bahan baku, dan biaya royalti
PT. Coca Cola Indonesia	2010-2013	Penggelembungan Biaya

Sumber: *bisniskeuangan.kompas.com*

PT RNI dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan. Dalam laporan keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar pertahun (*bisniskeuangan.kompas.com*).

PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Ilmiah UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (bisniskeuangan.kompas.com).

Pada tahun 2013, adalah kasus sengketa pajak oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (nasional.kontan.co.id).

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tidak menjurus kepada pelanggaran perpajakan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan juga dapat melakukan tindakan agresif perpajakan yaitu dengan memanfaatkan celah-celah sekecil mungkin yang ada dalam peraturan perpajakan untuk menekan biaya pajaknya. Menurut Frank, *et al* (2009) suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak baik yang dilakukan dengan ilegal (*tax evasion*) maupun yang legal (*tax avoidance*) merupakan suatu agresivitas pajak. Tindakan perusahaan agresif perpajakan juga menimbulkan biaya-biaya lain akibat dari adanya *agency problem*. (Masri dan Martani 2010).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Salah satu pimpinan yang berpengaruh adalah komisaris independen. Komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak berkaitan dengan kegiatan pajak perusahaan. Komisaris Independen juga mempengaruhi keputusan disuatu perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak. Komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Komisaris Independen melakukan pengarahan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri yang sering terjadi antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajemen perusahaan (*agen*) komisaris Independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak. (Putra dan Merikusiwati, 2016).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) juga dapat disebabkan oleh *capital intensity ratio*, *capital intensity ratio* sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang rendah (Putra dan Merikusiwati, 2016)

Capital intensity ratio adalah tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap adalah sebagai kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak didalam perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Faktor lain yang menjadi pemicu penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko dalam Fadhilah, 2014).

Hal lain yang menjadi penyebab penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika di bandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam memimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Rinaldi dkk, 2015).

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), adapun faktor-faktor tersebut adalah Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan *Capital Intensity Ratio*, dan Kepemilikan Institusi. Faktor-faktor ini digunakan karena adanya keterikatan yang cukup kuat antara satu sama lain yang ada diperusahaan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menemukan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Dyah Hayu (2015) yang menemukan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan Pohan (2008) dan Danis Ardyansah (2014) yang menemukan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Kurniasih, dkk (2012) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial pada penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Fadilla Rachmithasari (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan (*Size*) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Danis Ardyansah (2014) dan Chiou *et al.* (2012) menemukan bahwa variabel *capital intensity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Subakti (2012) menemukan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ginting Suryani (2016) Pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan *Corporate Governance* dan Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara Parsial Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, kepemilikan institusi dan *Capital Intensity Ratio*.

Perbedaan peneliti ini terletak pada periode penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Ginting Suryani (2016) periode tahun 2011-2014. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2015. Alasan menggunakan periode penelitian karena tahun terbaru dan selain itu untuk memperoleh jumlah sampel penelitian yang lebih efektif dan efisien sehingga hasil penelitian yang diperoleh baik secara statistik. Selain itu penelitian Ginting Suryani menggunakan 171 sampel perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian ini menggunakan sebanyak 87 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan kriteria.

Variabel penelitian ini mengacu pada variabel yang digunakan dalam penelitian Ginting Suriani (2016) yaitu Corporate Governance yang diukur melalui Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen serta kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak menggunakan variabel Kompensasi Rugi Fiskal dan menggantinya dengan variabel *Capital Intensity Ratio*. Dalam Penelitian yang dilakukan Dwilopa Dio Erlangga (2016) menemukan hasil bahwa *Capital Intensity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Merkusiwati (2016) yang menyatakan bahwa kepada kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh komisaris independen, *Capital intensity ratio* dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola pajaknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, *Capital intensity ratio* dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 baik secara simultan maupun secara parsial, dan untuk mengetahui kemampuan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh komisaris independen, *Capital intensity ratio* dan kepemilikan institusi terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

Bedasarkan fenomena, latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen, *Capital Intensity Ratio*, dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013—2015)”**

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran pajak?
2. Apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Komisaris Independen, *Capital Intensity Ratio*, Dan Kepemilikan Institusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah Ukuran Perusahaan mampu Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Komisaris Independen, *Capital Intensity Ratio*, dan Kepemilikan Institusi Terhadap penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran pajak?
2. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen, *Capital Intensity Ratio*, Dan Kepemilikan Institusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating?
5. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan mampu Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Komisaris Independen, *Capital Intensity Ratio*, dan Kepemilikan Institusi Terhadap penghindaran Pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pengaruh komisaris independen, *capital intensity ratio*, dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Akademisi

Bagi para akademisi dan penelitian lanjutan diharapkan penelitian ini dapat memberikan pegangan dan referensi bagi penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara singkat terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab lain saling berkaitan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang pajak, penghindaran pajak, variabel moderating dan variabel-variabel yang terkait tentang penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam mengadakan penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang digunakan, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.